

**PENGARUH KOMPETISI, *CORPORATE*
GOVERNANCE, STRUKTUR KEPEMILIKAN
TERHADAP PENGUNGKAPAN RISIKO**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

CINTIA HEKO AGUSTINA
NIM. 12030110141155

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Cintia Heko Agustina
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141155
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH KOMPETISI,
CORPORATE GOVERNANCE,
STRUKTUR KEPEMILIKAN
TERHADAP PENGUNGKAPAN
RISIKO**
Dosen Pembimbing : Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt

Semarang, 21 Agustus 2014

Dosen Pembimbing,

(Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt)
NIP. 19801001 200801 1014

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Cintia Heko Agustina
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141155
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH KOMPETISI,
CORPORATE GOVERNANCE,
STRUKTUR KEPEMILIKAN
TERHADAP PENGUNGKAPAN
RISIKO**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 29 Agustus 2014

Tim Penguji

1. Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si.,Akt. (.....)
2. Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt. (.....)
- 3.Drs. H. Sudarno, M.Si., Ph.D., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Cintia Heko Agustina, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Kompetisi, *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan Risiko**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 21 Agustus 2014

Yang membuat pernyataan,

(Cintia Heko Agustina)

NIM. 12030110141155

ABSTRACT

The purpose of this research is to provide empirical evidence of barriers to entry, ownership concentration, board size, board composition, firm size, liquidity, industrial sector and auditor type. Barriers to entry was measured by total fixed assets, ownership concentration was measured by percentage of shares held by substantial shareholders >5%, board size was measured by number of board member, board composition was measured by independent board/total board, firm size was measured by log natural of net sales, liquidity was measured by the acid test rate, industrial sector and auditor type was measured by variabel dummy.

Risk disclosure was measured by content analysis-sentence approach. The population of this research is 428 companies in the non-financial companies which were listed in Indonesian Stock Exchange (IDX). The research data were collected from annual report and financial statement for 2012. Based on stratified random sampling method, there are 102 samples. The research hypothesis were tested using multiple regression analysis.

The results of this research show that barriers to entry and auditor type have significant relationships with risk disclosure. Next, variable ownership concentration, board size, board composition, firm size, liquidity, industrial sector have no significant relationship with risk disclosure.

Keywords: Competition, Corporate Governance, Ownership Structure, Risk Disclosure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang kompetisi, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, likuiditas, jenis industri dan jenis auditor terhadap pengungkapan risiko. Kompetisi diukur dengan total aset tetap, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dengan akumulasi pemegang saham lebih dari 5%, ukuran dewan komisaris dengan total anggota komisaris, komposisi dewan komisaris dengan membagi jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris, ukuran perusahaan dengan logaritma natural penjualan bersih, likuiditas dengan *the acid test rate*, dan jenis industri dan jenis auditor dengan variabel *dummy*.

Pengungkapan risiko diukur dengan menggunakan metode konten analisis pendekatan kalimat. Populasi pada penelitian ini adalah 428 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012. Data penelitian diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan non-keuangan tahun 2012. Berdasarkan metode *stratified random sampling*, sampel yang diperoleh sebanyak 102 perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko adalah kompetisi dan jenis auditor. Selanjutnya, variabel independen struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, likuiditas dan jenis industri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan risiko.

Kata kunci: Kompetisi, *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan, Pengungkapan Risiko

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“...Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan ingat kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap....”

(Qs. Al Insyiroh : 6-8)

“...Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajaran.”

(Qs. Az-Zumar: 9)

*Seiring rasa syukurku, karya
ini kupersembahkan pada:*

*Allah SWT atas karunia dan ridho-Nya
Ayahanda dan Ibundaku tercinta,
Kakak-kakakku tercinta,
Keluarga Besar*

KATA PENGANTAR

Asslamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul Pengaruh Kompetisi, *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan Risiko dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis mendapatkan dukungan, bimbingan, bantuan dan fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Phd selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan motivasi, waktu, bimbingan, pembelajaran dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Hj. Zulaikha M.Si., Akt selaku dosen wali.
4. Dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji sidang dan memberikan masukan bagi penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
6. Orang tua tercinta, Bapak Dulkodir S.E. dan Ibu Kahemi atas kasih sayang dan perhatian yang melimpah, doa yang tulus, dorongan moral, nasihat, dukungan serta fasilitas kepada penulis.
7. Keluarga besar, khususnya kepada Ayu, Benny, Wahyu dan Nanang yang selalu memperhatikan, memotivasi, menasihati, dan mendoakan penulis. Dua keponakan tersayang, Rafa dan Hasna yang selalu menghibur penulis.
8. Teman-teman terbaik selama di bangku kuliah, Lida Febi, Tri Juna, Tjandra Dewi, Dewi Rosarina, Umi Farokha, Latiefatunnisa, Hana Pratiwi, Dias Nurmalasari, Annisa Parassayu dan seluruh keluarga besar Akuntansi Reguler 2 Kelas C yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kita semua sukses.
9. Teman-teman anak kos dodol *sumurboto girls 24B*, Dinda, Rina, Karina, Winnie, Rafi, Kiki, Intan, Faleri, Ais atas persahabatan, kebersamaan, dukungan, bantuan, doa dan semangat kepada penulis. Terimakasih sudah menjadi keluarga bagi penulis selama di Semarang.
10. Teman-teman terbaik di Tegal, Ike, Dinda, Binta, Shella, Novika, Lulu, Maulina, Danti, Rianti, Meliza, Nurul, Jundika dan Diah atas persahabatan, dukungan, doa dan semangat kepada penulis.

11. Seluruh teman-teman akuntansi 2010 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang atas kebersamaan, proses belajar dan pengalaman di bangku kuliah.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan doa dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penelitian ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 21 Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
ABSTACT	iv
ABSTRAK	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	11
2.1.2 Teori <i>Stakeholder</i>	13
2.1.3 Teori Legitimasi	14
2.1.4 Biaya-biaya Kepemilikan (<i>Proprietary Cost</i>).....	15
2.1.5 Pengungkapan (<i>Disclosure</i>)	17
2.1.6 Manajemen Risiko	20
2.1.7 Pengungkapan Risiko (<i>Risk Disclosure</i>).....	21
2.1.8 Kompetisi (<i>Barriers to Entry</i>).....	25
2.1.9 Struktur Kepemilikan	26
2.1.10 Ukuran Dewan Komisaris	28
2.1.11 Komposisi Dewan Komisaris Independen.....	29
2.1.12 Ukuran Perusahaan.....	30
2.1.13 Likuiditas	31
2.1.14 Jenis Industri	32
2.1.15 Jenis Auditor	33
2.2 Penelitian Terdahulu	34
2.3 Kerangka Pemikiran	37
2.4 Hipotesis	38
2.4.1 Pengaruh Kompetisi (<i>Barriers to Entry</i>) terhadap Pengungkapan Risiko	38
2.4.2 Pengaruh Struktur Kepemilikan yang Terkonsentrasi terhadap Pengungkapan Risiko.....	41
2.4.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Risiko	42

2.4.4 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Risiko.....	42
2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Risiko	43
2.4.6 Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan Risiko.....	44
2.4.7 Pengaruh Jenis Industri terhadap Pengungkapan Risiko	45
2.4.8 Pengaruh Jenis Auditor terhadap Pengungkapan Risiko	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	47
3.1.1 Variabel Dependen	47
3.1.2 Variabel Independen	50
3.1.2.1 Kompetisi (<i>Barriers to Entry</i>).....	50
3.1.2.2 Struktur Kepemilikan yang Terkonsentrasi	51
3.1.2.3 Ukuran Dewan Komisaris	52
3.1.2.4 Komposisi Dewan Komisaris Independen	52
3.1.2.5 Ukuran Perusahaan.....	52
3.1.2.6 Likuiditas	53
3.1.2.7 Jenis Industri	53
3.1.2.8 Jenis Auditor	53
3.2 Populasi dan Sampel	54
3.3 Jenis dan Sumber Data	56
3.4 Metode Pengumpulan Data	56
3.5 Teknik Analisis Data	56
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	57
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	57
3.5.2.1 Uji Normalitas	57
3.5.2.2 Uji Multikolinieritas	58
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	59
3.5.2.4 Uji autokorelasi	59
3.5.3 Analisis Regresi Berganda	60
3.5.4 Uji Hipotesis	61
3.5.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Statistik F)	613.
3.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	62
3.5.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	62
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	63
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	63
4.2 Analisis Data	64
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	64
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	69
4.2.2.1 Uji Normalitas	69
4.2.2.2 Uji Multikolinieritas	70
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	71
4.2.2.4 Uji Autokorelasi.....	72
4.2.3 Pengujian Hipotesis	73

4.2.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	73
4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	74
4.2.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	75
4.2.4 Hasil Pengujian Hipotesis.....	76
4.3 Pembahasan.....	78
4.3.1 Pengaruh Kompetisi (<i>Barriers to Entry</i>) terhadap Pengungkapan Risiko.....	78
4.3.2 Pengaruh Kepemilikan yang Terkonsentrasi terhadap Pengungkapan Risiko.....	79
4.3.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Risiko	79
4.3.4 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Risiko.....	80
4.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Risiko	81
4.3.6 Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan Risiko.....	82
4.3.7 Pengaruh Jenis Industri terhadap Pengungkapan Risiko	83
4.3.8 Pengaruh Jenis Auditor terhadap Pengungkapan Risiko	83
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Keterbatasan dan Saran	87
5.2.1 Keterbatasan.....	87
5.2.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Item Pengungkapan Risiko	48
Tabel 4.1 Klasifikasi Sektor Sampel Penelitian	63
Tabel 4.2 Deskripsi Variabel-variabel Penelitian	65
Tabel 4.3 Deskriptif Frekuensi Variabel Penelitian	67
Tabel 4.4 Deskripsi Pengungkapan berdasarkan Kategori Risiko	68
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikoloniaritas	71
Tabel 4.6 Hasil Uji Glejser	72
Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik F	73
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	74
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik t	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	38
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Histogram.....	69
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Normal Plot.....	70
Gambar 4.3 Rentang d_l dan d_u Uji Durbin-Watson.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A Daftar Nama Perusahaan	93
LAMPIRAN B Tabulasi Data	97
LAMPIRAN C Hasil Output SPSS	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan tahunan perusahaan merupakan bentuk akuntabilitas (pertanggungjawaban) dari pihak yang diberi wewenang menjalankan operasi perusahaan atau mengelola sumber daya perusahaan (pihak manajemen) terhadap pemilik perusahaan (pemegang saham). Laporan tahunan juga sebagai jalur informasi luar yang dimanfaatkan oleh *stakeholders* untuk mengetahui kondisi perusahaan, sehingga dapat memonitor dan memutuskan tindakan yang tepat terhadapnya. Pengungkapan informasi tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimal yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang tidak harus dipublikasikan. Pengungkapan merupakan transparansi mengenai kondisi dan hasil operasi perusahaan kepada publik guna mengurangi asimetri informasi.

Manajer perusahaan yang bukan pemilik sepenuhnya dalam perusahaan, tidak dapat diharapkan berkinerja baik sesuai tujuan pemilik lainnya (Smith, 1776 dalam Hadiprajitno, 2013). Manajer atau pemegang saham pengendali cenderung memiliki keunggulan informasi dibandingkan dengan para pemangku kepentingan lainnya, sehingga menyebabkan terjadinya asimetri informasi (Healy dan Palepu, 2001 dalam Darmadi dan Sodikin, 2013). Asimetri dapat ditekan melalui berbagai cara, termasuk pengungkapan informasi dalam laporan yang diterbitkan dan dapat

diakses oleh mereka yang membutuhkan (Narayanan *et al.*, 2000 dalam Darmadi dan Sodikin, 2013). Untuk itu salah satu mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi yaitu dengan pengungkapan yang lebih luas dengan tidak hanya mengungkapkan analisis keuangan saja, namun juga analisis non-keuangan seperti pengungkapan risiko perusahaan. Tujuannya agar informasi tersebut menjadi transparan dan relevan digunakan oleh *stakeholders*.

Kegagalan perusahaan telah menarik pemegang saham dan para pemangku kepentingan untuk memperhatikan pentingnya informasi terkait dengan risiko (Linsley *et al.*, 2008; Solomon *et al.*, 2000 dalam Mokhtar dan Mellett, 2013) sehingga perusahaan didorong untuk melaporkan tidak hanya aktivitas mereka, tetapi juga risiko di sekitarnya dan kemampuan mereka untuk mengelola risiko ini (Eccles *et al.*, 2001; Institute of Chartered Accountants di England dan Wales, 1999 dalam Mokhtar dan Mellett, 2013) serta tekanan untuk meningkatkan pelaporan risiko telah muncul dalam aturan PSAK 60 (revisi 2010) yang sebelumnya tidak diatur dalam PSAK 50 (revisi 2006). Salah satu cara praktik manajemen dalam mengelola risiko perusahaannya yaitu dengan mengungkapkannya pada laporan tahunan perusahaan. Keterbukaan informasi tersebut akan meningkatkan kepercayaan dari *stakeholder*.

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, calon investor perlu melakukan analisis investasi untuk melihat prospeknya dan memantau kondisi perusahaan yang menerbitkan. Tujuannya adalah untuk menentukan tingkat risiko yang akan dihadapi investor. Kesenjangan pengungkapan risiko menyebabkan investor tidak dapat mengidentifikasi profil risiko atau hasil perusahaan dengan memadai,

sehingga mereka gagal untuk mempertimbangkan skala dan kategori risiko dalam keputusan investasi mereka (Linsley *et al.*, 2008 dalam Mokhtar dan Mellett, 2013). Informasi yang relevan, dapat dipercaya, lengkap, dan tepat waktu harus tersedia di pasar modal agar investor dapat mengambil keputusan dengan tepat. Kurangnya informasi pengungkapan risiko yang memadai dalam laporan keuangan merupakan elemen kunci yang mengancam relevansi laporan keuangan (Cabedo dan Tirado, 2004 dalam Mokhtar dan Mellett, 2013).

Di luar negeri, penelitian yang membahas mengenai pengungkapan risiko dihubungkan dengan karakteristik perusahaan dan mekanisme *corporate governance* telah dilakukan oleh Amran *et al.* (2009); Oliveira *et al.* (2011); ElzahardanHussainey (2012), dan Mokhtar dan Mellett (2013). Pada penelitian-penelitian tersebut ditemukan ketidak konsistenan hasil (*research gap*). Pada penelitian karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan risiko antara lain menegaskan bahwa ukuran perusahaan (Amran *et al.*, 2009; Oliveria *et al.*, 2011, Elzahar dan Hussainey, 2012), jenis industri (Abraham dan Cox, 2007; Elzahar dan Hussainey, 2012), dan tipe auditor (Oliveria *et al.*, 2011 dan Mokhtar dan Mellett, 2013) merupakan penentu utama dari pelaporan risiko. Namun hasil yang berbeda pada penelitian Mokhtar dan Mellett (2013) bahwa ukuran perusahaan dan jenis industri tidak signifikan terhadap pelaporan risiko. Kemudian penelitian Elzahar dan Hussainey (2012); Mokhtar dan Mellet (2013) dengan hasil yang tidak signifikan antara likuiditas dan pelaporan risiko.

Pada penelitian mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan risiko antara lain menegaskan bahwa ukuran dewan (Mokhtar dan Mellet, 2013),

komisaris independen (Oliveria *et al.*, 2011), konsentrasi kepemilikan (Mokhtar dan Mellet, 2013) merupakan penentu utama dari pelaporan risiko. Hasil yang berbeda oleh Elzahar dan Hussainey (2012) bahwa ukuran dewan komisaris dan komisaris independen tidak mempengaruhi pengungkapan risiko, serta konsentrasi kepemilikan (Elzahar dan Hussainey, 2012; Oliveria *et al.*, 2011) tidak mempengaruhi pengungkapan risiko. Kemudian variabel baru yang digunakan oleh Mokhtar dan Mellett (2013) yaitu *competition* mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan pelaporan risiko sukarela.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengungkapan risiko telah dilakukan oleh Wardhana (2013) yang mereplikasi dari penelitian Oliviera *et al.* (2011), menemukan bahwa ukuran perusahaan dan kualitas auditor eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko, sedangkan komposisi dewan komisaris, struktur kepemilikan, komite audit independen, *leverage* dan jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko. Mubarok (2013) mereplikasi dari penelitian Elzahar dan Hussainey (2012), menemukan bahwa ukuran dewan komisaris dan *cross-listing* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan risiko, sedangkan kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris, jenis industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, *gearing*, dan likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan risiko.

Pengungkapan risiko merupakan salah satu bentuk dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Namun peningkatan tata kelola perusahaan di Indonesia dianggap tertinggal dari beberapa negara lain yang terkena krisis

keuangan tahun 1997, seperti Malaysia dan Korea Selatan (Claessens *et al.*, 2000 dan Rosser, 2005 dalam Darmadi dan Sodikin, 2013). Kurangnya pengungkapan risiko perusahaan yang memadai sehingga dibutuhkan faktor-faktor penentu yang mendorong pengungkapan risiko dalam laporan tahunan perusahaan.

Penelitian ini mengacu penelitian serupa yang dilakukan oleh Mokhtar dan Mellet (2013) mengenai pengungkapan risiko tahunan perusahaan yang dipengaruhi oleh peran kompetisi, *corporate governance* dan struktur kepemilikan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Egypt Exchange (EGX) tahun 2007. Penelitian tersebut menggunakan analisis isi-pendekatan kalimat untuk mengukur tingkat pelaporan risiko sukarela. Perbedaan pada penelitian ini antara lain: lokasi penelitian yang dilakukan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI); tahun penelitian yang berbeda yaitu tahun 2012; penghapusan variabel *ceo duality*; dan penambahan variabel komposisi dewan komisaris independen. Alasan menambah variabel komposisi dewan komisaris independen karena melihat *research gap* antara penelitian Wardhana (2013) dan Mubarok (2013). Kemudian alasan menghapus variabel *ceo duality* karena di Indonesia tidak terdapat rangkap jabatan dewan komisaris dan direksi, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 110 ayat (1) b UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa untuk menjadi anggota direksi bukanlah berasal dari orang yang sudah menjadi anggota dewan komisaris dalam satu perusahaan, begitu pula sebaliknya.

Penelitian ini merespon penelitian-penelitian sebelumnya untuk mempelajari pelaporan risiko di negara-negara dengan undang-undang pelaporan

risiko yang lemah dan memeriksa faktor-faktor penentu pada pelaporan risiko. Sejumlah penelitian menunjukkan beberapa ketidakkonsistenan hasil. Kontribusi yang berbeda terhadap penelitian pengungkapan risiko ini adalah penggunaan variabel kompetisi (*barriers to entry*) yang mengadopsi dari penelitian Mokhtar dan Mellett (2013). Media pelaporan yang digunakan dalam menentukan kelengkapan pengungkapan risiko adalah pelaporan dari *annual report* yang diambil pada tahun 2012.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetisi berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam perusahaan?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam perusahaan?
3. Apakah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam perusahaan?
4. Apakah struktur kepemilikan yang terkonsentrasi berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam perusahaan?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam perusahaan?
6. Apakah likuiditas terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam perusahaan?

7. Apakah jenis industri berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam perusahaan?
8. Apakah jenis auditor berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam perusahaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji efek dari kompetisi, *corporate governance*, struktur kepemilikan pada tingkat pengungkapan risiko perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI. Secara khusus, adalah untuk menguji :

1. Pengaruh kompetisi terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam perusahaan.
2. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam perusahaan.
3. Pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam perusahaan
4. Pengaruh struktur kepemilikan yang terkonsentrasi terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam perusahaan.
5. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam perusahaan.
6. Pengaruh likuiditas terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam perusahaan.
7. Pengaruh jenis industri terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam perusahaan.

8. Pengaruh jenis auditor terhadap tingkat pengungkapan risiko dalam perusahaan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini menambah studi literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko pada laporan tahunan perusahaan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan gagasan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pengungkapan risiko perusahaan.

2. Bagi Pengguna Informasi Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pengguna informasi akuntansi sebagai informasi dalam pengambilan keputusan terhadap perusahaan yang melakukan pelaporan risiko tersebut dengan menetapkan harapan mengenai sejauh mana keterbukaan informasi.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada regulator (Bapepam) dalam melakukan regulasi dan pengawasan yang efektif mengenai transparansi informasi tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI.

4. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dalam aspek transparansi dari laporannya serta memperbaiki praktik pengungkapan risikonya. Dengan ini diharapkan

akan mengurangi biaya keagenan dan mendorong para investor untuk menanamkan investasinya diperusahaan yang pengungkapannya lebih luas.

1.4 Sistematika penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab dimana antar bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan erat. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB IPENDAHULUAN

Bagian ini mengemukakan ide yang mendasari penyusunan penelitian, memuat hal-hal yang mengantarkan pada latar belakang penelitian atau pokok permasalahan, rumusan masalah yang menjadi pertanyaan untuk dilakukannya penelitian, tujuan yang akan dicapai dan manfaat yang diharapkan dari penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian yang diusulkan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini akan menguraikan tentang variabel penelitian, definisi operasional dari masing – masing variabel, penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan deskripsi uji penelitian, analisis data, dan pembahasan atas hasil penelitian data.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan teori keagenan (*agency theory*) yaitu hubungan antara satu orang atau lebih sebagai pemilik (*principal*) dengan melibatkan manajer (*agent*) untuk melakukan pelayanan atas nama *principal*, berupa pendelegasian beberapa wewenang dalam pengambilan keputusan kepada *agent*. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa jika dalam berhubungan kedua belah pihak telah memaksimalkan utilitas bagi kepentingan masing-masing, maka ada alasan yang kuat untuk percaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Demikian pula sebaliknya, jika sebuah perusahaan yang dimiliki sepenuhnya dan dikelola oleh pemilik, maka pemilik akan membuat keputusan operasi yang memaksimalkan utilitasnya. Perbedaan kepentingan tersebut menjadi potensi terjadinya konflik antara *principal* dan *agen* (masalah keagenan). Eisenhardt (1989) dalam Hadiprajitno (2013) menjelaskan masalah-masalah keagenan yang dapat dibagi menjadi dua kategori: (1) *adverse selection* (keputusan merugikan), yaitu terjadi jika seorang agen gagal memberikan kemampuannya; (2) *moral hazard*, yaitu kondisi di mana agen melalaikan tanggungjawabnya sehingga bertindak untuk kepentingannya sendiri atau bertentangan dengan kepentingan prinsipal.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa masalah keagenan dapat memicu timbulnya biaya-biaya keagenan (*agency cost*), seperti biaya pemantauan (*monitoring cost/ activities*), biaya pengikatan (*bounding cost*), dan kerugian residual (*residual loss*) yang seharusnya tidak terjadi bila perusahaan dikelola oleh pemiliknya sendiri. Penjelasan masing-masing biaya keagenan adalah sebagai berikut (Hadiprajitno, 2013):

1. Biaya *monitoring* yang dikeluarkan oleh prinsipal: biaya pengukuran dan evaluasi kinerja agen, biaya perencanaan dan penerapan indeks kompensasi manajer, biaya perencanaan dan penegakan peraturan/ kebijakan perilaku khusus, biaya perekrutan dan penggantian manajer, serta biaya terkait ekuitas pihak luar.
2. Biaya *bounding* yang ditanggung oleh agen: manfaat bagi manajer dalam kaitan dengan uang (*pecuniary*) dan tidak terkait uang (*non pecuniary*), biaya strukturisasi keuangan, biaya terkait *covenant* dan pembatasan perilaku manajerial oleh pihak luar, biaya reorganisasi, kas yang ditahan, serta biaya kerugian investasi.
3. Kerugian residual (*residual loss*) sebagai pengurang kekayaan prinsipal: risiko yang ditanggung atas hutang belum dilunasi dan biaya kebangkrutan.

Perspektif teori agensi juga menunjukkan bahwa hubungan prinsipal dan agen terkait dengan asimetri informasi. Agen sebagai pihak yang keterlibatannya lebih besar dalam perusahaan, memiliki akses ke informasi yang mungkin tidak tersedia bagi prinsipal tanpa biaya. Agen memiliki kesempatan untuk

menggunakan informasi ini atau untuk keuntungannya sendiri (Ittonen, 2010). Jadi teori agensi mengimplikasikan terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi karena *agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai aktivitas perusahaan daripada *principal*, namun karena perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* yang menyebabkan *agent* menyembunyikan informasi yang berharga bagi dirinya. Hal itu dapat merugikan *stakeholders*, sehingga dibutuhkan alat bantu untuk menghindari asimetri informasi yaitu pengungkapan dalam bentuk laporan tahunan perusahaan. Dengan pengungkapan yang lebih luas, diharapkan akan memberikan informasi yang lebih transparan dan relevan bagi *stakeholders* untuk dapat memantau hasil dari aktivitas operasi perusahaan dan memutuskan tindakan yang tepat pada perusahaan.

2.1.2 Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada *stakeholders* seperti para pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analisis dan pihak lainnya. Oleh karena itu, keberadaan perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* (Ghozali dan Chariri, 2007).

Power stakeholder dalam mengendalikan atau mempengaruhi perusahaan dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Deegan, 2000 dalam

Chariri dan Ghozali, 2007). Dengan demikian, ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan memberikan cara-cara yang memuaskan keinginan para *stakeholder* (Ullman 1985, dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

Teori *stakeholder* umumnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan dalam mengelola *stakeholders* (Gray *et al.*, 1997 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Salah satu cara perusahaan dalam memuaskan kepentingan *stakeholder* yaitu dengan melakukan pengungkapan yang lebih luas termasuk dalam pengungkapan risiko perusahaan. Tujuannya adalah sebagai pemenuh kebutuhan informasi yang diinginkan oleh *stakeholders*. Sebagai contoh, investor misalnya, akan menggunakan kedudukannya untuk mengumpulkan banyak informasi terkait risiko yang diperlukan dari perusahaan dengan tujuan membuat keputusan investasi yang rasional (Taures, 2011). Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi, akan mengungkap lebih banyak informasi terkait risiko untuk menyediakan pembenaran dan penjelasan mengenai apa yang terjadi dalam perusahaan kepada para *stakeholder* (Amran *et al.*, 2009 dalam Taures, 2011).

2.1.3 Teori Legitimasi

Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat (Ullman, 1982 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Selama organisasi dapat menyelaraskan nilai-nilai sosial dalam kegiatannya dengan norma-norma perilaku dalam sistem sosial masyarakat, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan (Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Ghoozali dan Chariri,

2007). Demikian pula sebaliknya, ketika ada perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, maka legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam (Lindblom, 1994; Dowling dan Preffer, 1975 dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa legitimasi sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk dapat bertahan hidup (Ashroft dan Gibbs 1990; Dowling dan Preffer 1975; O'Donovan, 2002 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Jadi untuk mengurangi kesenjangan legitimasi, perusahaan harus dapat mengidentifikasi aktivitasnya dan mengidentifikasi publik yang memiliki power sehingga mampu memberikan legitimasi kepada perusahaan (Neu *et al.*, 1998 dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

2.1.4 Biaya-biaya Kepemilikan (*Proprietary Cost*)

Dalam memutuskan untuk menerbitkan informasi mengenai kondisi perusahaan terdapat biaya dan manfaat (*cost and benefit*) yang harus dipertimbangkan. Biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkan informasi perusahaan dapat digolongkan menjadi berbagai macam. Menurut Suropto (1999) dalam Sudarmadji dan Sularto (2007) biaya-biaya tersebut :

1. Biaya Pengungkapan Langsung adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menyajikan informasi, meliputi :
 - a. Biaya pengumpulan data
 - b. Biaya pemrosesan informasi

- c. Biaya pengauditan
 - d. Biaya penyebaran informasi
2. Biaya Pengungkapan Tidak Langsung adalah biaya-biaya yang timbul karena diungkapkannya dan/atau tidak diungkapkannya suatu informasi, meliputi:

a. Biaya Litigasi

Biaya litigasi muncul karena pengungkapan informasi yang tidak mencukupi atau informasi yang menyesatkan.

b. Biaya Kepemilikan

Biaya kepemilikan dibagi menjadi dua yaitu biaya kerugian persaingan (*competitive disadvantage*) dan biaya politik.

Biaya *competitive disadvantage* terjadi akibat informasi yang diungkapkan perusahaan, melemahkan daya saing atau posisi perusahaan karena informasi yang diterbitkan melalui laporan keuangan dan tahunan perusahaan dapat digunakan oleh pesaing untuk memperkuat daya saing mereka. Sedangkan, biaya politik timbul jika praktik pengungkapan perusahaan memicu regulasi oleh pemerintah.

Teori Biaya Kepemilikan dapat disebut sebagai Teori Kebijakan Penundaan (*discretionary disclosure theory*) (Verecchia,1983; Dye,1986; Darrough dan Stoughton,1990; Wagenhofer,1990 dalam Septiani, 2005). Septiani (2005) menyatakan bahwa biaya-biaya kepemilikan diteliti dalam konteks persaingan, persaingan dengan perusahaan lain yang sudah ada di dalam industri

atau pun dengan pesaing potensial yang hendak masuk ke dalam industri. Dalam hal pengungkapan informasi perusahaan, semakin besar *proprietary cost* maka semakin besar rangsangan untuk tidak mengungkapkan informasi. Teori ini menyatakan tidak adanya biaya pengungkapan menyebabkan perusahaan mempunyai insentif mengungkapkan informasi relevan secara sukarela (Septiani, 2005).

2.1.5 Pengungkapan (*Disclosure*)

Chariri dan Ghozali, (2007) menjelaskan arti kata *disclosure* yaitu tidak menutupi atau tidak menyembunyikan, sehingga jika dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha. Informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. Cooke (1989) dalam Darmadi dan Sodikin (2013) menjelaskan bahwa tujuan dari keterbukaan informasi perusahaan adalah untuk menyampaikan informasi kepada para pemangku kepentingan ekonomi, yang dapat menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya yang langka.

Beberapa banyak informasi yang harus diungkapkan tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca, tetapi juga pada standar yang dibutuhkan (Chariri dan Ghozali, 2007). Pengungkapan Menurut Hendriksen (1994) secara umum ada tiga konsep yaitu:

1. Pengungkapan cukup (*adequate disclosure*)

Yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

2. Pengungkapan wajar (*fair disclosure*)

yaitu tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.

3. Pengungkapan lengkap (*full disclosure*)

Yaitu mensyaratkan penyajian semua informasi yang relevan. Bagi beberapa pihak, diartikan sebagai penyajian informasi yang berlebihan, sehingga tidak bisa dikatakan layak. Terlalu banyak informasi akan membahayakan, karena penyajian rincian yang tidak penting justru akan mengaburkan informasi yang signifikan membuat laporan keuangan sulit ditafsirkan.

Seperti yang dijelaskan dalam Chariri dan Ghozali (2007), ada pendapat yang mengatakan bahwa perusahaan akan mengungkapkan semua informasi dalam rangka berjalannya fungsi pasar modal dan jika tidak diungkapkan hal itu disebabkan karena informasi tidak relevan bagi investor atau ada di tempat lain. Namun ada pula bukti yang lain yang menyatakan bahwa perusahaan menolak meningkatkan pengungkapan kecuali ada tekanan dari profesi akuntansi dan pemerintah, karena takut akan memberikan manfaat bagi pesaing.

Dari ulasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua informasi diungkapkan oleh perusahaan ke dalam laporan tahunan. Pengungkapan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*)

Chariri dan Ghozali (2007) menjelaskan adanya potensi kegagalan pasar yang disebabkan oleh kegagalan dalam pengungkapan informasi yang cukup, menjadikan adanya intervensi pemerintah untuk memaksa perusahaan melakukan pengungkapan cukup. Pengungkapan inilah yang disebut dengan pengungkapan wajib. Jadi pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku di suatu negara.

2. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan lebih dari persyaratan, mewakili pilihan bebas pada bagian manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan lainnya yang dianggap relevan dengan keputusan kebutuhan pengguna laporan tahunan mereka (Meek *et al.*, 1995 dalam Sodikin dan Darmadi, 2013). Masing-masing perusahaan berbeda dalam hal banyaknya informasi sukarela yang akan diungkap kepada publik. Perusahaan menimbang *cost and benefit* untuk mengungkapkannya agar manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya yang digunakan untuk mengungkapkannya.

2.1.6 Manajemen Risiko

Risiko diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan dalam *Business Dictionary*, risiko adalah sebuah probabilitas atau ancaman, kerusakan, cedera, kewajiban, kerugian, atau kejadian negatif lainnya yang disebabkan oleh kerentanan eksternal maupun internal dan yang dapat dihindari melalui tindakan preventif.

Manajemen risiko merupakan pendekatan perusahaan secara obyektif dalam memutuskan cara terbaik untuk mengendalikan masalah ancaman terhadap keamanan suatu organisasi. Oleh karena itu, manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai pembuatan keputusan mengenai risiko dan implementasi lebih lanjut, serta mengalir dari estimasi risiko dan evaluasi risiko (Great Britain.C.C.T.A, 1993, p.11 dalam Egbuji, 1999). Manajemen risiko dapat proaktif atau reaktif. Proaktif memiliki pendekatan yang lebih antisipatif atau pencegahan risiko. Pendekatan ini mendukung implementasi kontrol tanpa menunggu bencana terjadi. Sedangkan reaktif yaitu kontrol untuk mitigasi setelah terjadi bencana (The Royal Society, 1993, p. 153 dalam Egbuji, 1999). Analisis risiko memiliki dua tujuan utama: (1) untuk memastikan bahwa manajemen tidak mengabaikan ancaman secara disengaja atau tidak disengaja yang signifikan bagi organisasi; (2) untuk menjamin bahwa dengan analisis biaya-manfaat, manajemen menghindari menghabiskan biaya lebih banyak untuk mengontrol eksposur dari pada kerugian potensial (Egbuji, 1999).

2.1.7 Pengungkapan Risiko (*Risk Disclosure*)

Pengungkapan risiko menurut Linsley dan Shrivess (2006) dalam Mokhtar dan Mellett (2013) yaitu jika pembaca diberitahu setiap peluang atau prospek, atau berbagai *hazard*, bahaya, kerugian, dan eksposur pada perusahaan atau manajemen yang telah berdampak atau mungkin berdampak di masa depan. Dalam literatur-literatur sebelumnya yang dikutip dalam penelitian Mokhtar dan Mellett (2013) bahwa kalimat pengungkapan risiko diklasifikasikan berdasarkan sifatnya (kuantitatif/ kualitatif), jenis beritanya (risiko baik/ buruk/ netral), pandangan (masa lalu/ masa depan), dan jenisnya (keuangan/ non-keuangan).

Pentingnya pengungkapan risiko telah membuat badan regulator internasional mengeluarkan aturan-aturan yang mensyaratkan setiap perusahaan untuk mengungkapkan informasi risikonya dalam laporan tahunan perusahaan. Cabedo dan Tirado, (2004); Eccles *et al*, (2001) dalam Mokhtar dan Mellett (2013) menegaskan bahwa Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) telah mengeluarkan tiga standar yang terkait dengan penyajian dan pengukuran instrumen keuangan, yaitu IAS 3, 39 dan IFRS 7, pendekatan serupa juga telah diikuti oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB). Menurut IASB, unsur-unsur komentar manajemen yang berguna harus tercakup antara lain deskripsi yang jelas dari sumber daya, risiko dan hubungan yang mempengaruhi nilai jangka panjang entitas yang signifikan, serta bagaimana sumber daya, risiko dan hubungan tersebut dikelola. Selain itu, *Securities and Exchange Commission* (1997) dalam Mokhtar dan Mellett (2013), mengumumkan dengan resmi persyaratan pengungkapan risiko pasar instrumen derivatif. Namun, persyaratan

pelaporan wajib hanya mencakup risiko yang terbatas dan sebagian besar hanya risiko keuangan.

Peraturan di Indonesia yang mendukung pengungkapan risiko dalam laporan tahunan perusahaan yaitu PSAK No.60 (revisi 2010) secara tegas mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrument keuangan. Pengungkapan risiko tersebut tidak terbatas pada risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Risiko pasar meliputi risiko mata uang asing, risiko suku bunga, dan risiko harga lainnya. Definisi untuk setiap jenis risiko menurut PSAK No.60 (revisi 2010) :

1. Risiko kredit, yaitu risiko dimana suatu pihak atas instrument keuangan akan menyebabkan kerugian keuangan terhadap pihak lain diakibatkan kegagalannya dalam memenuhi kewajiban.
2. Risiko likuiditas, yaitu risiko dimana suatu entitas menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangannya yang diselesaikan dengan penyerahan kas atau aset keuangan lainnya.
3. Risiko pasar, yaitu risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Meliputi tiga jenis, yaitu: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga lainnya.
4. Risiko mata uang asing, yaitu risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrument keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

5. Risiko suku bunga, yaitu risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrument keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.
6. Risiko harga lainnya, yaitu risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain risiko yang timbul dari risiko suku bunga atau risiko mata uang asing). Risiko harga lainnya muncul karena perubahan dalam, misalnya harga komoditas, atau harga ekuitas.

Dalam PSAK No.60 (revisi 2010) dijelaskan dua bentuk pengungkapan risiko yaitu pengungkapan kualitatif dan kuantitatif. Dalam pengungkapan kualitatif entitas harus mengungkapkan eksposur risiko, bagaimana risiko timbul, tujuan, kebijakan, proses pengelolaan risiko, dan metode pengukuran risiko. Sedangkan untuk pengungkapan kuantitatif entitas disyaratkan mengungkapkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar termasuk membuat analisa sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar.

Aturan-aturan lain yang mendukung pengungkapan risiko antara lain Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala bagi Emiten atau Perusahaan Publik, memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir. Uraian dimaksud sekurang-kurangnya memuat, salah satunya yaitu penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko

tersebut, misalnya: risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional dan kebijakan pemerintah.

Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-347/BL/2012 mengenai Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Berkala bagi Emiten atau Perusahaan Publik, menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan, serta kebijakan dalam pengelolaan risiko, termasuk, namun tidak terbatas pada risiko sebagai berikut:

1. risiko kredit, antara lain ikhtisar analisis umur aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetapi tidak mengalami penurunan nilai;
2. risiko likuiditas, antara lain: (a) analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan derivatif dan nonderivatif yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual yang bertujuan untuk pemahaman terhadap periode arus kas; dan (b) deskripsi mengenai cara Emiten atau Perusahaan Publik mengelola risiko likuiditas;
3. risiko pasar, antara lain analisis sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar dimana entitas terdampak pada akhir periode pelaporan, yang menunjukkan dampak perubahan pada variabel risiko yang relevan pada tanggal tersebut terhadap laba rugi dan ekuitas; dan

4. risiko lainnya yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.8 Kompetisi (*Barriers to entry*)

Kompetisi diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persaingan. Kompetisi dalam dunia usaha merupakan persaingan yang dialami oleh perusahaan untuk dapat masuk kedalam industri usaha yang sejenis. Setiap industri memiliki perbedaan pada tingkat kemudahan dan kesulitan bagi pendatang baru untuk dapat memasukinya. Dalam suatu persaingan, perusahaan pendatang baru yang berpotensi dapat memasuki usaha sejenis dan bertujuan memperkuat daya saing untuk merebut dan menguasai pangsa pasar disebut pesaing potensial. Porter (1979) mengatakan bahwa pendatang baru masuk ke dalam industri membawa kapasitas baru, keinginan untuk mendapatkan atau merebut pangsa pasar, dan memperoleh sumber daya substansial. Kemudian kebutuhan untuk menginvestasikan sumber daya keuangan yang besar agar dapat bersaing, menciptakan sebuah hambatan untuk masuk.

Peneliti akuntansi cenderung menggunakan hambatan masuk (*barriers to entry*) sebagai proksi untuk kompetisi (Depoers, 2000 dalam Mokhtar dan Mellett, 2013). *Barriers to entry* adalah suatu struktur elemen yang berkaitan dengan hambatan bagi perusahaan yang berpotensi untuk masuk ke dalam pasar (Septiani, 2005). Menurut Porter (1979) terdapat enam sumber utama hambatan masuknya pesaing baru yaitu : (1) skala ekonomis; (2) diferensiasi produk; (3) prasyarat modal; (4) kerugian biaya independen dari ukuran; (5) akses ke saluran distribusi; dan (6) kebijakan pemerintah. Sedangkan menurut Morvan (1991); Depoer (2000) dalam Widrayanti (2011) sumber hambatan masuknya pesaing baru yaitu:

regulasi, strategi diferensiasi produk, dan kondisi-kondisi obyektif untuk memapankan proses-proses produksi dan/atau penjualan.

Menurut Widrayanti (2011) dua kategori hambatan yang pertama tidak tampak di dalam laporan tahunan, sedangkan kategori hambatan ketiga adalah jumlah investasi modal yang diperlukan untuk memasuki sebuah industri yaitu aset tetap tampak di dalam laporan tahunan. Jumlah modal tersebut menunjukkan input keuangan yang diperlukan untuk menjadi perusahaan yang kompetitif seperti perusahaan yang sudah mapan. Dijelaskan oleh Porter (1979) bahwa perusahaan yang besar memiliki kebutuhan modal besar dalam bidang-bidang tertentu, memiliki sumber daya keuangan yang dapat menyerang hampir semua industri dan membatasi kelompok kemungkinan pendatang. Kemampuan perusahaan dalam mengatasi hambatan masuk bergantung dengan jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan, karena semakin tinggi modal yang dimiliki perusahaan maka semakin mudah masuk dalam ke dalam pasar. Dalam penelitian ini pengukuran kompetisi (*barriers to entry*) sama dengan penelitian Mokhtar dan Mellett (2013) yaitu diukur dengan total aset tetap.

2.1.9 Struktur Kepemilikan

Saham adalah suatu bukti kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh investor. Proporsi kepemilikannya adalah sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Struktur kepemilikan dapat dibagi menjadi struktur kepemilikan tersebar dan terkonsentrasi. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi adalah sebagian kecil individu atau kelompok yang memiliki saham yang jumlahnya lebih dominan dibanding pemilik saham lainnya dalam suatu perusahaan. Struktur

kepemilikan yang terkonsentrasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan akumulasi persentase pemegang saham mayoritas yang memiliki saham lebih dari 5%. Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal diatur tentang transparansi dan proses kepemilikan saham 5% atau lebih, sehingga batasan 5% sudah dianggap signifikan di BEI (Hadiprajitno, 2013). Struktur kepemilikan di Indonesia cenderung terkonsentrasi tinggi, seperti yang diungkapkan oleh Claessens *et al.*(2000) dalam Darmadi (2013) bahwa perusahaan yang terdaftar Indonesia mempunyai tingkat konsentrasi kepemilikan dan kontrol keluarga yang lebih tinggi dibandingkan rekan-rekannya di Asia Timur.

Shleifer dan Vishny (1997) dalam Darmadi (2013) menjelaskan bahwa potensial *agency problem* yang berkaitan dengan kepemilikan terkonsentrasi terjadi karena terdapat pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pada kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi, kepentingan pemegang saham mayoritas dan manajemen cenderung disejajarkan. Namun *agency problem* tersebut dapat terjadi, di mana pemegang saham mayoritas memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengambil alih sumber daya perusahaan dengan mengorbankan pemegang saham minoritas. Hal tersebut membuat pemegang saham mayoritas memiliki kendali absolute, sehingga dapat melakukan tindakan yang menguntungkan pemegang saham mayoritas namun merugikan pemegang saham minoritas (Felina, 2007).

2.1.10 Ukuran Dewan Komisaris

Dalam pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) penerbit KNKG tahun 2006 dijelaskan bahwa kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*twoboard system*) yaitu dewan komisaris (dewan pengawas) dan dewan direksi (dewan manajemen). Keduanya memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai dewan pengawas, anggota dewan komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak memiliki akses untuk memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.

Dalam pedoman GCG 2006 juga disebutkan bahwa dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan, memberikan nasihat kepada direksi, memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG dan memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan. Dewan komisaris fungsinya mewakili kepentingan para pemegang saham, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan tahunan sebagai perwujudan akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan asas GCG. Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

2.1.11 Komposisi dewan komisaris independen

Dalam pedoman *Good Corporate Governance* tahun 2006 dijelaskan bahwa dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan komisaris independen dalam peraturan Bapepam IX.I.5 adalah dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang tidak bekerja dan bertanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu 6 bulan terakhir; tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik; tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri; dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut. Dalam pertimbangan untuk melindungi pemegang saham minoritas, keberadaan dewan komisaris independen telah diatur dalam keputusan BAPEPAM No.Kep-305/BEJ/07-2004, peraturan nomor I-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat pada tanggal 19 Juli 2004. Dikemukakan bahwa keberadaan dewan komisaris independen jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Rifai (2009) menjelaskan bahwa melihat keadaan di Indonesia, semua perusahaan yang diperdagangkan di Bursa efek selalu dikuasai oleh pemegang saham mayoritas. Jumlah pemegang saham minoritas yang besar dan tersebar, tidak dapat dipersatukan sehingga menyebabkan kewenangan dan kedudukannya tidak terwakili dalam pengambilan keputusan. Maka keberadaan komisaris independen adalah sebagai wasit untuk menyeimbangkan keputusan dewan komisaris. Jadi keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim objektif yang melindungi dan mewakili pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan stakeholder lainnya, dengan tujuan agar kepentingan mereka tidak terabaikan (Rifai, 2009).

2.1.12 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan beberapa variabel antara lain total penjualan, total aktiva, kapitalisasi pasar, jumlah nilai buku hutang, nilai ekuitas pasar, dan jumlah karyawan (Zadeh dan Eskandri, 2012). Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diproksikan dengan total penjualan bersih seperti pada penelitian Mokhtar dan Mellett (2013). Jika total penjualan semakin besar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Hal ini disebabkan karena semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uangnya (Sudarmadji dan Sularto, 2007).

Hubungan antara ukuran perusahaan dengan luas informasi yang diungkapkan dapat dijelaskan melalui teori agensi, karena perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung berpotensi memiliki biaya keagenan yang lebih

besar (Jensen dan Mackling, 1976 dalam Hikmah dkk, 2011). Hal tersebut terjadi karena perusahaan yang besar lebih sulit dalam hal pemantauan (Fitdina, 2009 dalam Andriani dan Januarti, 2010) sehingga muncul lebih banyak biaya *monitoring* daripada perusahaan kecil. Untuk mengurangi biaya keagenan tersebut maka perusahaan akan mengungkapkan informasi lebih banyak (Hikmah dkk, 2011). Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula risiko yang harus dihadapinya seperti risiko keuangan, operasioanal, reputasi, peraturan, dan informasi (KPMG, 2001 dalam Andriani dan Januarti, 2010), sehingga para *stakeholder* membutuhkan informasi terkait risiko lebih banyak melalui pengungkapan risiko perusahaan.

2.1.13 Likuiditas

Likuiditas adalah indikator untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban keuangan jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Ukuran yang dapat mewakili likuiditas adalah dengan pembagian total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek. Misalnya jika likuiditasnya 1 maka setiap Rp 1 kewajiban jangka pendek dijamin oleh 1 kali aktiva lancar atau dijamin 100% aktiva lancar. Suryono dan Prastiwi (2011) mengatakan bahwa perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi maka memiliki kemampuan yang besar dalam membayar kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu dan menandakan perusahaan mempunyai kinerja yang baik serta mencerminkan kondisi keuangan yang kuat. Banyak pihak investor, kreditor dan lembaga pemerintah memperhatikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan

hidupnya dan mempertimbangkan likuiditas sebagai faktor kunci dalam mengevaluasi risiko kebangkrutan (Owusu-Ansah, 2005 dalam Mokhtar dan Mellett, 2013). Kondisi-kondisi tersebut mendorong perusahaan melakukan pengungkapan lebih luas untuk meyakinkan *stakeholder*.

2.1.14 Jenis Industri

Jenis industri menunjukkan penggolongan perusahaan sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha yang dioperasikannya. Dalam penelitian ini proksi jenis industri digolongkan menjadi dua yaitu manufaktur dan non-manufaktur mengikuti penelitian dari Mokhtar dan Mellett (2013). Pembuatan laporan perusahaan adalah budaya organisasional yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, antara lain: jenis industri; tipe auditor; skope bisnis; dan pasar modal di mana perusahaan berada, sehingga perusahaan yang termasuk dalam industri manufaktur mungkin memiliki cara pengungkapan yang berbeda dengan perusahaan lain dengan industri yang berbeda (Benardi dkk, 2009). Misalnya seperti risiko komoditas yang hanya dimiliki oleh perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur mengolah komoditas barang mentah. Selain itu dijelaskan pada penelitian Mubarok (2013) bahwa pada industri yang berbeda akan dipengaruhi oleh batasan-batasan yang berbeda dalam lingkungan bisnisnya yang menyebabkan tipe dan tingkat risiko akan berbeda pada setiap jenis industri sesuai dengan kompleksitas aktivitas penciptaan nilainya. Teori yang mendasarinya adalah perilaku sebuah perusahaan mungkin tidak sesuai dengan yang termuat dalam sebuah indeks kelengkapan pengungkapan, jika perusahaan tidak

bergabung dengan suatu kelompok yang menghasilkan *market culture* tertentu (Subiyantoro, 2006 dalam Benardi dkk, 2009).

2.1.15 Jenis Auditor

Pada penelitian-penelitian terdahulu kantor akuntan publik dibedakan dalam dua klasifikasi yaitu KAP *Big Four* yaitu kantor akuntan publik besar dan terkenal yang tersebar di seluruh negara dan KAP *non-Big Four* yaitu kantor akuntan publik kecil yang beroperasi hanya pada wilayah domestik. Kualitas auditor eksternal mempengaruhi kualitas hasil audit perusahaan karena perbedaan keahlian yang mereka miliki. Auditor memainkan peran yang penting dalam meningkatkan strategi dalam pengungkapan informasi perusahaan secara keseluruhan (Benardi dkk, 2009).

KAP *Big Four* dipandang memiliki reputasi yang baik dalam memberikan panduan mengenai praktek *good corporate governance*, yaitu mampu membantu internal auditor dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko sehingga meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko perusahaan (Chen *et al.*, 2009 dalam Meizaroh dan Luyanda, 2011). Perusahaan yang diaudit oleh KAP berukuran besar akan menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas berdasarkan regulasi yang telah ditentukan, karena memiliki kualitas, reputasi dan kredibilitas dibanding KAP yang berukuran kecil (Becker *et al.*, 1998 dalam Benardi dkk, 2009).

2.2 Penelitian Terdahulu

Di luar negeri, penelitian yang membahas mengenai pengungkapan risiko dihubungkan dengan karakteristik perusahaan dan mekanisme *corporate governance* telah dilakukan oleh Amran *et al.* (2009); Oliveira *et al.* (2011); Elzahar dan Hussainey (2012), dan Mokhtar dan Mellett (2013). Pada penelitian-penelitian tersebut ditemukan ketidak konsistenan hasil (*research gap*). Pada penelitian karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan risiko antara lain menegaskan bahwa ukuran perusahaan (Amran *et al.*, 2009; Oliveria *et al.*, 2011, Elzahar dan Hussainey, 2012), jenis industri (Abraham dan Cox, 2007; Elzahar dan Hussainey, 2012), dan tipe auditor (Oliveria *et al.*, 2011 dan Mokhtar dan Mellett, 2013) merupakan penentu utama dari pelaporan risiko. Namun hasil yang berbeda pada penelitian Mokhtar dan Mellett (2013) bahwa ukuran perusahaan dan jenis industri tidak signifikan terhadap pelaporan risiko. Kemudian penelitian Elzahar dan Hussainey (2012); Mokhtar dan Mellet (2013) dengan hasil yang tidak signifikan antara likuiditas dan pelaporan risiko.

Pada penelitian mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan risiko antara lain menegaskan bahwa ukuran dewan (Mokhtar dan Mellet, 2013), komisaris independen (Oliveria *et al.*, 2011), konsentrasi kepemilikan (Mokhtar dan Mellet, 2013) merupakan penentu utama dari pelaporan risiko. Hasil yang berbeda oleh Elzahar dan Hussainey (2012) bahwa ukuran dewan komisaris dan komisaris independen tidak mempengaruhi pengungkapan risiko, serta konsentrasi kepemilikan (Elzahar dan Hussainey, 2012; Oliveria *et al.*, 2011) tidak mempengaruhi pengungkapan risiko. Kemudian variabel baru yang

digunakan oleh Mokhtar dan Mellett (2013) yaitu *competition* mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan pelaporan risiko sukarela.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengungkapan risiko telah dilakukan oleh Wardhana (2013) yang mereplikasi dari penelitian Oliviera *et al.* (2011), menemukan bahwa ukuran perusahaan dan kualitas auditor eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko, sedangkan komposisi dewan komisaris, struktur kepemilikan, komite audit independen, *leverage* dan jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko. Mubarak (2013) mereplikasi dari penelitian Elzhar dan Hussainey (2012), menemukan bahwa ukuran dewan komisaris dan *cross-listing* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan risiko, sedangkan kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris, jenis industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, *gearing*, dan likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan risiko.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil penelitian
1.	Amran <i>et al.</i> (2009)	Pengungkapan Risiko	Diversifikasi produk, diversifikasi geografi, ukuran perusahaan, jenis industri, leverage	Ukuran perusahaan dan jenis industri (infrastruktur dan teknologi) berhubungan secara signifikan dengan pengungkapan risiko.
2.	Oliveira <i>et al.</i> (2011)	Pengungkapan Risiko	Konsentrasi kepemilikan, komisaris independen, komite audit independen, jenis	Komisaris independen, tipe auditor, ukuran perusahaan, tingkat sensitifitas lingkungan,

Tabel 2.1 (Lanjutan)

			auditor, leverage, ukuran perusahaan, tingkat sensitifitas lingkungan	leverage berhubungan secara signifikan dengan pengungkapan risiko
4.	Wardhana (2013)	Pengungkapan Risiko	Struktur kepemilikan, dewan komisaris independen, komite audit independen, jenis auditor, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, jenis industri	Ukuran perusahaan dan dewan komisaris independen berhubungan secara signifikan dengan pengungkapan risiko.
3.	Elzahar dan Hussainey (2012)	Pengungkapan Risiko	Jenis industri, ukuran perusahaan, <i>cross listing</i> , profitabilitas, likuiditas, <i>gearing</i> , kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, <i>CEO duality</i> , komposisi dewan komisaris, ukuran komite audit	Ukuran perusahaan dan jenis industri berhubungan secara signifikan dengan pengungkapan risiko
5.	Mubarok (2013)	Pengungkapan Risiko	Tipe jenis industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>gearing</i> , likuiditas, <i>cross-listing</i> , kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, ukuran komite audit	<i>Cross-listing</i> dan ukuran dewan komisaris berhubungan secara signifikan dengan pengungkapan risiko

Tabel 2.1 (Lanjutan)

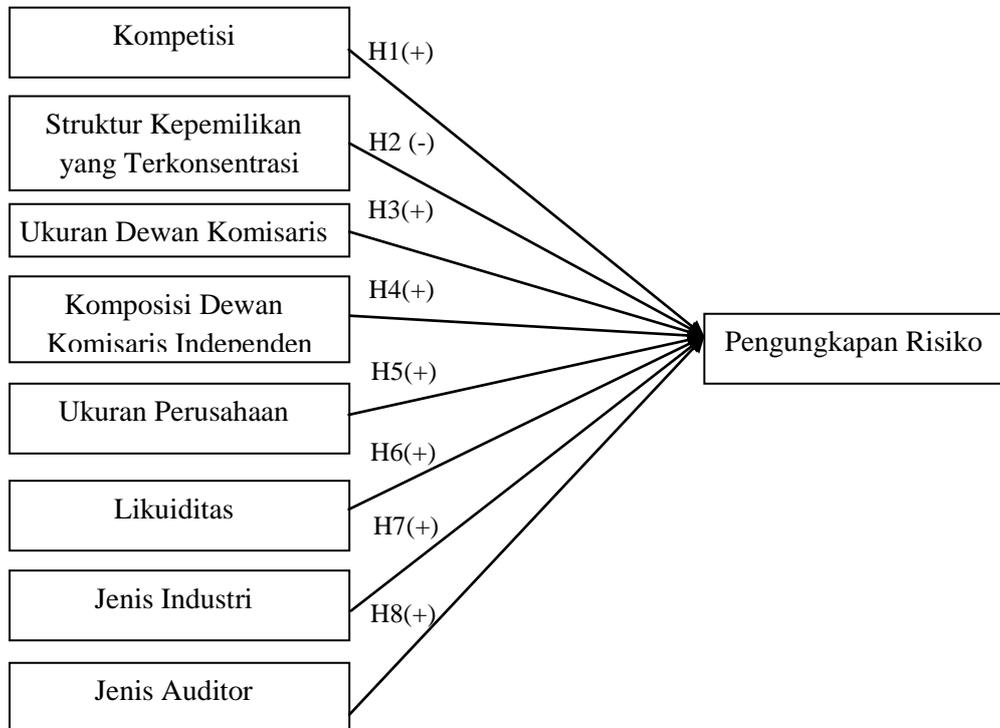
6.	Mellet dan Mokhtar (2013)	Pengungkapan Risiko	<i>Competition</i> , ukuran dewan, konsentrasi kepemilikan, <i>ceo duality</i> , jenis auditor, ukuran perusahaan, jenis industri, likuiditas.	<i>Competition</i> , ukuran dewan, tipe auditor berhubungan secara signifikan dengan pengungkapan risiko sukarela. Ukuran dewan, konsentrasi kepemilikan, <i>ceo duality</i> dan tipe auditor berhubungan secara signifikan dengan pengungkapan risiko wajib.
----	---------------------------	---------------------	--	---

Sumber: Jurnal Penelitian

2.3 Kerangka Pemikiran

Kurangnya pengungkapan risiko di Indonesia membuat peneliti tertarik mencari faktor-faktor yang membuat pengungkapan risiko semakin luas. Variabel independen yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah mengacu pada penelitian Mokhtar dan Mellett (2013) antara lain kompetisi (*barriers to entry*), struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, likuiditas, jenis industri, dan jenis auditor. Terdapat hasil yang tidak konsisten pada penelitian-penelitian terdahulu, oleh karena itu dilakukan penelitian lebih lanjut. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kompetisi (*Barriers to Entry*) terhadap Pengungkapan Risiko

Laporan keuangan dan laporan tahunan merupakan sumber utama informasi bagi pesaing baru maupun pesaing yang sudah ada. Tidak semua informasi diungkapkan oleh pihak manajemen, mereka menyembunyikan informasi yang merupakan rahasia dari perusahaan agar tidak dimanfaatkan oleh pesaing yang akan melemahkan posisi perusahaan. Semakin luas informasi yang diungkapkan membuat laporan tahunan menjadi semakin bermanfaat namun diikuti dengan semakin meningkatnya biaya penyajian informasi. Manajemen akan mempertimbangkan biaya dan manfaat (*cost and benefit*) untuk

mengungkapkan informasi secara luas kepada publik. Jika *benefit* lebih besar dari pada *cost* maka pihak manajemen akan mengungkapkan informasinya secara lebih luas. Chariri dan Ghozali (2007; h.166) menjelaskan bahwa informasi akuntansi keuangan akan diupayakan untuk disajikan dalam laporan keuangan, selama manfaat yang diperoleh dari penyajian informasi tersebut melebihi biaya yang diperlukan untuk menghasilkan.

Jenis-jenis biaya pengungkapan tersebut dijelaskan pada studi Suroptono (1999) dalam Sudarmadji dan Sularto (2007) yaitu biaya pengungkapan langsung dan biaya pengungkapan tidak langsung. Biaya pengungkapan tidak langsung dibagi menjadi dua yaitu biaya litigasi dan biaya kepemilikan. Kemudian untuk menjelaskan hipotesis kompetisi menggunakan teori biaya kepemilikan yaitu biaya *competitive disadvantage*. Biaya *competitive disadvantage* terjadi bila informasi tahunan yang diungkapkan akan melemahkan daya saing perusahaan karena informasi tersebut dapat digunakan oleh para pesaing potensial, yaitu para pendatang baru yang berpotensi masuk dalam pasar yang sama.

Peneliti akuntansi cenderung memproksikan variabel kompetisi dengan menggunakan hambatan masuk (Depoers, 2000 dalam Mokhtar dan Mellett, 2013). Beberapa sumber hambatan masuk telah dijelaskan oleh Porter (1979) dan Morvan (1991); Dapoer (2000), namun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah investasi modal karena yang tampak dalam laporan tahunan (Widrayanti, 2011). Ketika sebuah perusahaan akan memasuki tingkat persaingan usaha yang sangat tinggi, maka dibutuhkan aset sebagai modal investasi awal untuk mengatasi hambatan memasuki pasar tersebut (Setiawan, 2011).

Berdasarkan teori biaya kepemilikan, perusahaan dengan modal investasi kecil enggan membuat pengungkapan yang lebih luas tentang aktivitas mereka karena dapat menimbulkan biaya *competitive disadvantage*. Seperti penelitian Dye (1985) dalam Mokhtar dan Mellett (2013) menjelaskan bahwa berdasarkan perspektif biaya kepemilikan, perusahaan kurang termotivasi untuk memberikan pengungkapan sukarela mengenai informasi-informasi yang dapat digunakan oleh pesaing potensial untuk memperkuat daya saing mereka, karena pesaing dapat menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan dalam memasuki pasar. Demikian pula penelitian Laidroo (2009) dalam Mokhtar dan Mellett (2013) menunjukkan bahwa perusahaan yang beroperasi dengan hambatan masuk yang tinggi cenderung mengungkapkan informasi lebih luas, karena pengungkapan tersebut tidak akan dapat digunakan oleh pesaing potensial. Penelitian Leuz (2004) dalam Mokhtar dan Mellett (2013) menunjukkan bahwa perusahaan yang dilindungi oleh hambatan masuk tinggi lebih mungkin untuk memberikan informasi yang sensitif secara komersial seperti pengungkapan terkait risiko. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan berdaya saing tinggi tidak takut dengan pesaing potensial. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut,

H1 : Kompetisi berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko

2.4.2 Pengaruh Struktur Kepemilikan yang Terkonsentrasi terhadap Pengungkapan Risiko

Teori keagenan memprediksi perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal karena adanya pemisah antara kepemilikan dan kontrol perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Perusahaan yang struktur kepemilikannya lebih tersebar mudah menimbulkan biaya keagenan, karena pemilik saham minoritas lebih sulit dalam mengawasi agen. Oleh karena itu perusahaan yang dipegang secara tersebar lebih mungkin untuk memberikan informasi lebih sukarela dalam laporan tahunan mereka, tujuannya untuk mengkonfirmasi bahwa mereka bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham (Depoers, 2000; Ghazali dan Weetman, 2006 dalam Mokhtar dan Mellett, 2013). Hal ini berhubungan dengan besarnya tanggung jawab perusahaan kepada para *stakeholder* karena dasar kepemilikan yang lebih luas. Sedangkan dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, informasi terkait risiko tidak akan dilaporkan melalui laporan tahunan namun melalui rapat dewan (Konishi dan Ali, 2007 dalam Mokhtar dan Mellett, 2013) karena jika jumlah pemegang saham yang berperan aktif lebih banyak maka intervensi aktif tersebut dapat mengurangi biaya keagenan (Wardhana, 2013), sehingga semakin tinggi tingkat pengawasan atau semakin terkonsentrasi membuat pengungkapan risiko tidak terlalu dibutuhkan (Oliviera *et al.*, 2011). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut,

H2 : Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko

2.4.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Risiko

Berdasarkan teori keagenan, keefektifan mekanisme *corporate governance* salah satunya ditentukan oleh besarnya ukuran dewan komisaris yang dapat mengurangi biaya agensi (Linda, 2012). Susunan dewan yang lebih besar akan lebih kuat, karena dapat membuat koordinasi, komunikasi dan pengambilan keputusan yang lebih praktis dibandingkan susunan dewan kecil (Beiner *et al.*, 2004 dalam Linda, 2012). Ukuran dewan komisaris yang kecil mengalami kekurangan keahlian dan membuat biaya keagenan cukup tinggi, sehingga mempengaruhi kemampuan dewan dalam memenuhi tanggung jawab tata kelola perusahaan (Bassett *et al.*, 2007 dalam Mokhtar dan Mellet, 2013). Sedangkan jumlah dewan yang besar diprediksi memiliki insentif lebih dalam mengawasi praktik pengungkapan risiko agar tidak ada informasi yang disembunyikan (Mubarok, 2013). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut,

H3 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko

2.4.4 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Risiko

Linda (2012) menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* diperlukan untuk mengurangi ketidakefisienan yang timbul dari permasalahan keagenan. Keefektifan mekanisme *corporate governance* salah satunya ditentukan oleh komposisi dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris independen dikatakan sebagai indikator independensi dewan karena kehadiran komisaris independen

dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan bebas dalam pengambilan keputusan (Meyzaroh dan Lucyanda, 2011) atau tidak memihak pada kepentingan manapun.

Fungsi dewan komisaris dalam teori keagenan yaitu untuk meyakinkan pihak manajemen dalam memenuhi dan melindungi kepentingan para pemegang saham (Elzhar dan Hussainey, 2012). Oleh karena itu, adanya komisaris dari luar yang tidak terafiliasi dengan perusahaan diharapkan dapat memberikan saran yang independen kepada seluruh anggota komisaris perusahaan (Elzhar dan Hussainey, 2012). Keberadaan komisaris independen sebagai bagian pelaksanaan *good corporate governance* mungkin dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko perusahaan (Mubarok, 2013). Perusahaan dengan tingkat independensi dewan yang tinggi akan cenderung mengungkapkan informasi untuk mengurangi biaya agensi (Oliviera, *et al.*, 2011). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut,

H4 : Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko

2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Risiko

Teori keagenan memprediksi bahwa biaya agensi dan biaya politik merupakan fungsi dari ukuran perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976; Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Mokhtar dan Mellett, 2013). Perusahaan yang besar membutuhkan pengungkapan yang lebih luas untuk mengurangi biaya agensi dan untuk menurunkan asimetri informasi (Watts dan Zimmerman, 1983 dalam Elzhar dan Hussainey, 2012). Perusahaan yang besar juga akan lebih sensitif

terhadap biaya politik diharapkan untuk mematuhi persyaratan standar akuntansi daripada perusahaan-perusahaan kecil, dalam rangka memberikan kredibilitas yang lebih unggul dalam laporan sehingga akan mengungkapkan lebih banyak informasi keuangan mereka untuk menghilangkan kecaman publik atau intervensi pemerintah. (Dumontier dan Raffournier, 1998 dalam Mokhtar dan Mellett, 2013). Selain itu menurut teori legitimasi, perusahaan-perusahaan besar lebih termotivasi untuk mengungkapkan risiko dengan tujuan mempertahankan legitimasi dan reputasi mereka (Oliviera *et al.*, 2011). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut,

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko

2.4.6 Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan Risiko

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki tepat waktu. Wallace *et al.*, (1994) dalam Ruwita (2012) menegaskan bahwa likuiditas dapat juga dipandang sebagai ukuran kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan, kemudian dari kinerja yang tinggi berhubungan dengan risiko yang tinggi. Dijelaskan juga oleh Cooke (1989) dalam Ruwita (2012) bahwa tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan, kemudian diikuti dengan risiko yang semakin tinggi. Kondisi tersebut mendorong perusahaan mengungkapkan informasi risiko yang lebih luas untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kredibel (Ruwita, 2012) dan untuk memuaskan keinginan *stakeholder* akan kebutuhan informasi perusahaan. Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan yang memiliki tingkat risiko yang

tinggi, akan mengungkapkan lebih banyak informasi terkait risiko untuk menyediakan pembenaran dan penjelasan mengenai apa yang terjadi dalam perusahaan kepada para *stakeholder* (Amran *et al.*, 2009 dalam Taures, 2011). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut,

H6 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko

2.4.7 Pengaruh Jenis Industri terhadap Pengungkapan Risiko

Menurut teori legitimasi dan perspektif biaya politik pada penelitian Watts dan Zimmerman (1986) dalam Mokhtar dan Mellet (2013) yang menegaskan bahwa industri kemungkinan dipengaruhi kerentanan politik perusahaan, seperti perusahaan minyak dan gas yang lebih sensitif secara politik dari pada industri yang lain. Akibatnya, perusahaan-perusahaan di industri ini dapat memberikan lebih banyak pengungkapan termasuk informasi yang terkait dengan risiko dalam laporan tahunan mereka, tujuannya untuk melegitimasi kegiatan mereka dan mengkonfirmasi kepatuhan mereka dengan nilai-nilai sosial.

Pembuatan laporan perusahaan adalah budaya organisasional yang dipengaruhi oleh jenis industri, sehingga perusahaan yang termasuk dalam industri manufaktur mungkin memiliki cara pengungkapan yang berbeda dengan perusahaan pada industri yang berbeda (Benardi dkk, 2009). Misalnya seperti risiko komoditas yang hanya dimiliki oleh perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur membeli dan mengolah komoditas barang mentah. Contoh lain, industri ekstraktif akan menginformasikan lebih mengenai dampak lingkungan dari kegiatan usahanya daripada industri lain (Diereks dan Preston,

1977; Hakcton dan Milne, 1996 dalam Taures, 2011). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut,

H7 : Jenis industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko

2.4.8 Pengaruh Jenis Auditor terhadap Pengungkapan Risiko

Perusahaan dengan biaya agensi yang tinggi cenderung mengontrak kantor akuntan publik yang berkualitas tinggi yaitu *Big four* (Jensen dan Mackling, 1976 dalam Oliviera *et al.*, 2011). Sejalan dengan teori keagenan, perusahaan audit yang besar cenderung untuk memberikan jaminan yang lebih kepada para pemegang saham sehingga akan mengurangi biaya pemantauan (*monitoring cost*) yang dikeluarkan oleh principal (Wallace *et al.*, 1994 dalam Mokhtar dan Mellett, 2013). Jaminan tersebut termasuk kualitas dan luasnya pengungkapan informasi perusahaan mencakup pengungkapan risiko. KAP yang lebih besar akan mendorong perusahaan mengungkapkan lebih luas untuk mempertahankan reputasi KAP (Chalmers dan Godfrey, 2004 dalam Oliviera *et al.*, 2011). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut,

H8 : Jenis auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen (bebas) yaitu variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain, dan variabel dependen (terikat), yaitu variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut:

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan informasi risiko, mencakup risiko wajib dan sukarela dalam laporan tahunan. Pengungkapan risiko menurut Linsley dan Shrivess (2006) dalam Mokhtar dan Mellett (2013) yaitu jika pembaca diberitahu setiap peluang atau prospek, atau berbagai *hazard*, bahaya, kerugian, dan eksposur pada perusahaan atau manajemen yang telah berdampak atau mungkin berdampak di masa depan. Proksi pengungkapan risiko menggunakan metode *content analysis* pendekatan kalimat yang diukur dengan menghitung jumlah total kalimat yang mengandung informasi risiko dalam laporan tahunan. Metode ini mengikuti beberapa studi pengungkapan risiko (Abraham dan Cox, 2007; Amran *et al.*, 2009; Taures, 2009; Elzahar dan Hussainey, 2012; Mubarak, 2013; Mokhtar dan Mellett, 2013).

Sebelumnya para peneliti telah menggunakan berbagai unit koding antara lain kata, kalimat, halaman dan paragraf. Hackston dan Milne (1996) dalam

Mokhtar dan Mellett (2013) menegaskan bahwa penggunaan kalimat sebagai unit koding menghasilkan reliabilitas pengukuran yang lebih baik dibandingkan dengan unit koding lain seperti kata-kata. Milne dan Adler (1999) dan Linsley dan Shrives (2006) dalam Amran *et al.* (2009) mengkritik penggunaan kata-kata sebagai pengukuran, karena kata tidak menyampaikan makna apapun, kecuaidisebut kalimat untuk konteks yang tepat. Selain itu, sulit untuk memutuskan mana kata-kata yang dianggap sebagai pengungkapan risiko.

Item-item dari pengungkapan risiko sukarela yang digunakan dalam pengkodean penelitian ini dikembangkan oleh Linsley dan Shrives (2005), Amran *et al.*(2009), Mokhtar dan Mellett (2013) sebagai dasar analisis isi pendekatan kalimat yaitu :

Tabel 3.1
Item Pengungkapan Risiko

<i>Financial Risk</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Interest rate</i> b. <i>Exchange rate</i> c. <i>Commodity</i> d. <i>Liquidity</i> e. <i>Credit</i> f. <i>Going concern</i> g. <i>Cost of capital</i>
<i>Operation Risk</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Customer satisfaction</i> b. <i>Product Development</i> c. <i>Efficiency and performance</i> d. <i>Sourcing</i> e. <i>Stock obsolescence and shrinkage</i> f. <i>Product and service failure</i> g. <i>Environmental</i> h. <i>Health and safety</i> i. <i>Brand name erosion</i> j. <i>Management process</i>
<i>Empowerment Risk</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Leadership and management</i> b. <i>Outsourcing</i>

Tabel 3.1 (Lanjutan)

	<i>c. Performance incentives</i> <i>d. Change readiness</i> <i>e. Communications</i>
<i>Information Processing and Technology Risk</i>	<i>a. Integrity</i> <i>b. Access</i> <i>c. Availability</i> <i>d. Infrastructure</i>
<i>Integrity Risk</i>	<i>a. Risk-management policy</i> <i>b. Management and employee fraud</i> <i>c. Illegal acts</i> <i>d. Reputation</i>
<i>Strategic Risk</i>	<i>a. Enviromental scan</i> <i>b. Industry</i> <i>c. Business portfolio</i> <i>d. Competitors</i> <i>e. Pricing</i> <i>f. Valuation</i> <i>g. Planning</i> <i>h. Life cycle</i> <i>i. Performance measurment</i> <i>j. Regulatory</i> <i>k. Sovereign and political</i>

Sumber :Mokhtar dan Mellett (2013)

Aturan keputusan dalam menghitung total kalimat pengungkapan risiko dalam penelitian ini dikembangkan oleh Mokhtar dan Mellett (2013), yaitu :

1. Kalimat harus dikodekan sebagai pengungkapan risiko jika pembaca diberitahu tentang setiap setiap peluang atau prospek, atau berbagai *hazard*, bahaya, kerugian dan eksposur yang telah berdampak pada perusahaan atau mungkin berdampak pada perusahaan di masa depan
2. Jika kalimat memiliki lebih dari satu klasifikasi mungkin, informasi tersebut akan diklasifikasikan ke dalam kategori yang paling ditekankan dalam kalimat

3. Setiap pengungkapan yang diulang dicatat sebagai kalimat pengungkapan risiko setiap kali dibahas
4. Jika pengungkapan terlalu samar dalam referensi untuk risiko, maka tidak akan dicatat sebagai pengungkapan risiko

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen terdiri dari kompetisi, struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, ukuran perusahaan, likuiditas, jenis industri, dan jenis auditor, dengan proksi pengukuran mengadopsi penelitian dari Mokhtar dan Mellett (2013).

3.1.2.1 Kompetisi (*Barriers to Entry*)

Kompetisi merupakan penentu utama dari profil risiko perusahaan (Beretta dan Bozzolan, 2004 dalam Mokhtar dan Mellett, 2013). Peneliti akuntansi cenderung memproksikan kompetisi dengan menggunakan *barriers to entry* (Depoers, 2000; Mokhtar dan Mellett, 2013). *Barriers to entry* adalah suatu struktur elemen yang berkaitan dengan hambatan bagi perusahaan yang berpotensi untuk masuk ke dalam pasar (Septiani, 2005). Terdapat beberapa sumber hambatan masuk yang dijelaskan oleh Porter (1979) dan Morvan (1991); Dapoer (2000), namun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah investasi modal yang tampak dalam laporan tahunan yaitu aset tetap (Widrayanti, 2011).

Ketika sebuah perusahaan akan memasuki tingkat persaingan usaha yang sangat tinggi, maka dibutuhkan aset sebagai modal untuk mengatasi hambatan tersebut (Setiawan, 2011). Jumlah modal tersebut menunjukkan input keuangan

yang digunakan sebagai pengukuran karena merupakan modal investasi awal yang penting dalam memasuki persaingan bisnis dan untuk menjadi perusahaan yang kompetitif seperti perusahaan yang sudah mapan (Widrayati, 2011). Pesaing potensial membutuhkan modal untuk dapat merebut pangsa pasar dan mendapatkan sumber daya substansial. Kemampuan perusahaan dalam mengatasi hambatan masuk bergantung dengan jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan, karena semakin tinggi modal yang dimiliki perusahaan maka semakin mudah masuk dalam ke dalam pasar. Jumlah investasi modal tersebut ditunjukkan oleh jumlah aset tetap dalam perusahaan. Proksi untuk hambatan memasuki pasar (*barriers to entry*) mengadopsi penelitian Mokhtar dan Mellett (2013) diukur dengan total aset tetap perusahaan.

3.1.2.2 Struktur Kepemilikan yang Terkonsentrasi

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi diukur dengan menggunakan akumulasi persentase pemegang saham mayoritas yang memiliki saham lebih dari 5%. Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal diatur tentang transparansi dan proses kepemilikan saham 5% atau lebih, sehingga batasan 5% sudah dianggap signifikan di BEI (Hadiprajitno, 2013). Pengukuran ini juga mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Mokhtar dan Mellett (2013) dengan cara menghitung jumlah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham lebih dari 5% dalam perusahaan.

3.1.2.3 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota yang menjabat menjadi dewan komisaris. Variabel ini diukur dengan cara menghitung jumlah seluruh anggota dewan komisaris baik independen maupun tidak independen yang dimiliki oleh perusahaan.

3.1.2.4 Komposisi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan komisaris perusahaan yang dipilih dari pihak luar dan tidak terafiliasi dengan perusahaan. Skala yang digunakan untuk mengukur komposisi dewan komisaris independen yaitu dengan skala rasio, yaitu persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dibagi dengan total anggota dewan komisaris.

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Komisaris}} \times 100\% \quad (3.1)$$

3.1.2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Variabel ini diukur dengan nilai logaritma natural total penjualan bersih perusahaan (LnSIZE). Penggunaan nilai logaritma natural (Ln) dengan tujuan menghindari problem data natural yang tidak berdistribusi normal. Penggunaan proksi total penjualan bersih mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Mokhtar dan Mellett (2013).

3.1.2.6 Likuiditas

Likuiditas adalah tingkat kemampuan perusahaan dalam membiayai kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Semakin tinggi likuiditas maka semakin besar kemampuan membayar liabilitas pendeknya. Likuiditas diukur dengan menggunakan *the acid test rate*. Apabila dirumuskan maka sebagai berikut :

$$\textit{The acid test rate} = \frac{\textit{Aktiva Lancar}}{\textit{Kewajiban Lancar}} \quad (3.2)$$

3.1.2.7 Jenis Industri

Mengacu pada penelitian Mokhtar dan Mellett (2013), jenis industri dibagi menjadi dua kategori dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu kategori industri manufaktur dan non-manufaktur. Setara 1 jika jenis industri manufaktur dan setara 0 jika selain industri manufaktur, yaitu seperti industri dagang dan jasa.

3.1.2.8 Jenis Auditor

Jenis auditor eksternal suatu perusahaan diukur dengan variabel *dummy*, yaitu setara 1 jika perusahaan diaudit oleh salah satu perusahaan audit *Big Four* (Price Water House Coopers, Ernst & Young, KPMG, dan Deloitte) dan 0 jika diaudit oleh *non-Big Four*. KAP *Big Four* adalah kantor akuntan publik besar dan tersebar di seluruh negara, sedangkan KAP *non-Big Four* adalah kantor akuntan publik kecil yang beroperasi secara domestik.

3.2 Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2012 yaitu 428 perusahaan. Namun dikurangi 37 perusahaan yang tidak tersedia laporan tahunannya, sehingga populasi akhir penelitian menjadi 391 perusahaan. Perusahaan keuangan seperti bank dan perusahaan asuransi dikecualikan, karena mereka beroperasi di bawah peraturan yang berbeda, khususnya perbankan yang telah diwajibkan untuk mengungkapkan risiko secara lebih luas dan diatur dalam peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum.

Untuk menentukan ukuran sampel, menggunakan rumus sebagai berikut (Saunders *et al.*, 2007 dalam Mokhtar dan Mellett, 2013) :

$$S = \frac{P(1 - P)}{\left(\frac{A^2}{Z^2}\right) + \left(\frac{P(1-P)}{N}\right)}$$

Di mana:

S : ukuran sampel

N : jumlah populasi

P : perkiraan awal dari persentase perusahaan dalam populasi yang memiliki atribut menarik

A : akurasi yang diinginkan (misalnya 5 persen)

Z : jumlah standar deviasi dari distribusi sampling (Z unit) yang sesuai dengan kepercayaan yang diinginkan (1,96 untuk tingkat kepercayaan 95 persen dan 1,64 untuk tingkat kepercayaan 90 persen)

Saunders *et al.* (2007) dalam Mokhtar dan Mellett (2013) mengusulkan dengan menyimpulkan "P" dari sampel pilot sekitar 30 pengamatan. Dalam penelitian ini, penentuan atribut yang menarik mengadopsi penelitian Mokhtar dan Mellett (2013) yaitu perusahaan harus diperdagangkan setidaknya selama 4 tahun. Kemudian 30 perusahaan diambil secara acak dan 27 perusahaan memenuhi kriteria sehingga P = 90 persen . Dengan demikian berdasarkan rumus di atas, dengan jumlah populasi (N) sebesar 391 perusahaan, P = 90 persen , Z = 1,96 , dan A = 0,05 maka jumlah sampel yang didapat adalah:

$$S = \frac{P(1 - P)}{\left(\frac{A^2}{Z^2}\right) + \left(\frac{P(1-P)}{N}\right)}$$

$$S = \frac{90(1 - 90)}{\left(\frac{0,05^2}{1,96^2}\right) + \left(\frac{P(1-90)}{391}\right)}$$

$$S = 102$$

Hasil pehitungan menunjukkan jumlah sampel 102 perusahaan dari populasi yang telah ditentukan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *stratified random sampling* berdasarkan klasifikasi sektor industri. *Stratified random sampling* digunakan untuk menghasilkan sampel yang lebih representatif dan akurat dibandingkan dengan *simple random sampling* karena berbagai kelompok industri dalam populasi akan terwakili pada sampel. Klasifikasi sektor industri mengadopsi IDX, terdapat 8 jenis indutri non-keuangan yaitu :

1. *Argiculture*
2. *Mining*

3. *Basic industry and Chemicals*
4. *Miscellaneous Industry*
5. *Consumer goods industry*
6. *Property, real estate an building construction*
7. *Infrastruktur, utilities and transportation*
8. *Trade, service, and investment*

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan tahun 2012. Data mengenai jumlah kalimat pengungkapan risiko dapat diambil dari narasi laporan tahunan dan laporan keuangan. Data ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, jenis auditor dan jenis industri dapat diambil dari narasi laporan tahunan. Sedangkan data kompetisi (*barriers to entry*), ukuran perusahaan, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dan likuiditas dapat diambil dari ringkasan laporan keuangan pada ICMD. Data laporan tahunan dan laporan keuangan dapat diakses dari website BEI di www.idx.co.id.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan penelusuran data sekunder menggunakan metode studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter seperti laporan keuangan, laporan tahunan dan melihat ringkasan laporan keuangan pada ICMD (*Indonesian Capital Market Directory*) perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yaitu menjelaskan tentang prosedur dalam menguji hipotesis penelitian yaitu berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimal, nilai minimal, dan standar deviasi (Ghozali, 2011). Analisis ini bertujuan untuk memperjelas karakteristik secara umum setiap variabel sehingga mudah dipahami secara kontekstual.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum uji analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian telah memenuhi kriteria asumsi klasik, sehingga terhindar dari estimasi bias. Terdapat empat uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika terdapat normalitas, maka residual terdistribusi secara normal dan independen. Terdapat dua cara uji normalitas yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Alat uji analisis grafik berupa analisis grafik histogram dan analisis grafik normal plot,

sedangkan uji statistik berupa *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik (Ghozali, 2011):

1. Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, Ghozali (2011):

1. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak atau variabel tidak terdistribusi secara normal.
2. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05 maka H_0 diterima atau variabel terdistribusi secara normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Korelasi menunjukkan variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Model regresi yang baik yaitu jika tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai lawannya yaitu *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai

tolerance dan VIF berkebalikan yaitu $VIF=1/tolerance$. Nilai cutoff yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $<0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2011).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas yaitu jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya konstan. Model regresi yang buruk jika terjadi kebalikannya yaitu heteroskedastisitas sehingga keakuratan hasil prediksi meragukan. Uji heteroskedastisitas yang dilakukan adalah dengan uji Glejser.

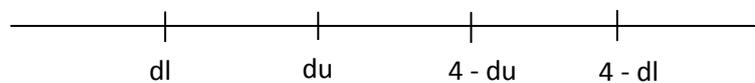
Uji Glejser dilakukan dengan meregresi variabel *residual absolute* dengan variabel bebas. Jika variabel bebas signifikan mempengaruhi variabel *residual absolute*, maka terdapat indikasi terjadinya heteroskedastisitas. Hal initerlihat dari nilai probabilitas signifikansinya dibawah tingkat kepercayaan 0,05 maka dapat disimpulkan model regresi mengandung heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi dapat dideteksi salah satunya melalui uji Durbin - Watson (DW test) yaitu dengan

membandingkan nilai DW hitung dengan DW tabel. Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2011) :

1. Jika $0 < d < dl$, maka terjadi autokorelasi positif
2. Jika $4 - dl < d < 4$, maka terjadi autokorelasi negatif.
3. Jika $du < d < 4 - du$, maka tidak ada autokorelasi, baik positif atau negatif.
4. Jika $dl < d < du$ atau $4 - du < d < 4 - dl$, maka tidak ada pengambilan keputusan.



Keterangan :

dl : nilai batas bawah tabel DW

du : nilai batas atas tabel DW

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Metode regresi linier berganda (*multiple regression analysis*) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang diajukan oleh peneliti dengan menggunakan software SPSS 19. Model regresi linear berganda yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan yaitu:

$$RD = \alpha + \beta_1 BE - \beta_2 KT + \beta_3 UDK + \beta_4 KDKI + \beta_5 SIZE + \beta_6 LIQ + \beta_7 JI + \beta_8 JA + e$$

Di mana :

RD : *risk disclosure* (pengungkapan risiko)

α : konstanta

β : koefisien regresi

- BE : *barriers to entry* (kompetisi)
- KT : kepemilikan terkonsentrasi
- UDK : ukuran dewan komisaris
- KDKI: komposisi dewan komisaris independen
- SIZE : ukuran perusahaan
- LIQ : likuiditas
- JI : jenis industri
- JA : jenis auditor
- e : error term, tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Ujistatistik F digunakan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011), dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi $f < 0,05$ maka H_0 ditolak (koefisien regresi signifikan). Jadi terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $f > 0,05$ maka H_0 diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Jadi secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur tingkat sejauh mana kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai antara nol dan satu. Jika nilai R^2 mendekati nilai satu berarti variasi variabel independen mampu memberikan informasi hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun sebaliknya jika R^2 kecil berarti kemampuan variasi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2011).

3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi-variabel dependen (Ghozali, 2011), dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi $t < 0.05$ maka H_0 ditolak, berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Bila nilai signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen dengan variabel dependen secara individual.